

Sikap Mahasiswa dalam Mendukung Kebijakan Pajak: Peran Persepsi Korupsi dan Pendidikan Perpajakan

Arif Rahman Budi Santoso¹, Hero Priono²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 Mei 2025

Revised:

Accepted:

Keywords:

Corruption Perception, Tax Education, Student Attitudes, Tax Policy, Theory of Planned Behavior, Social Cognitive Theory.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi terhadap korupsi dan pendidikan perpajakan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah. Fokus utama diarahkan pada bagaimana dua variabel tersebut membentuk preferensi dan kecenderungan sikap mahasiswa sebagai calon wajib pajak.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarakan kepada mahasiswa, kemudian dianalisis menggunakan teknik PLS-SEM untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel. Populasi merupakan mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur yang berjumlah 1031 mahasiswa yang kemudian diambil sampel sebanyak 124 mahasiswa.

Originalitas/Novelty: Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi dua perspektif teoretis utama – *Theory of Planned Behavior* dan *Social Cognitive Theory* – dalam menganalisis sikap fiskal generasi muda, khususnya mahasiswa. Penelitian ini juga menyoroti secara simultan aspek moral (persepsi korupsi) dan aspek kognitif (pendidikan perpajakan) sebagai determinan sikap terhadap kebijakan perpajakan, yang belum banyak dikaji secara bersamaan dalam konteks Indonesia.

Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa. Persepsi ini dapat membentuk sikap yang mendukung maupun tidak mendukung terhadap kebijakan pajak, tergantung pada bagaimana mahasiswa menilai integritas dan transparansi pemerintah. Sementara itu, pendidikan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teknis saja belum tentu cukup untuk membentuk sikap tertentu, karena masih ada faktor lain yang turut memengaruhi, seperti pengalaman pribadi dan konteks lingkungan.

Implikasi: Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan perpajakan yang lebih aplikatif serta integrasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan akademik. Selain itu, pemerintah dan otoritas perpajakan perlu melakukan pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif dan kreatif dalam menyosialisasikan kebijakan pajak kepada generasi muda guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi fiskal mereka di masa depan.

Research Objective: This study aims to analyze the influence of perceptions of corruption and tax education on students' attitudes in supporting government tax policies. The main focus is directed at how these two variables shape the preferences and attitudinal tendencies of students as prospective taxpayers.

Research Methods: This study uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through structured questionnaires distributed to students, then analyzed using PLS-SEM techniques to test the relationship and influence between variables. The population consisted of 1,031 accounting students at UPN Veteran East Java, from which a sample of 124 students was taken.

Originality/Novelty: The novelty of this study lies in the integration of two major theoretical perspectives—Theory of Planned Behavior and Social Cognitive Theory—in analyzing the fiscal attitudes of the younger generation, particularly university students. This study also highlights simultaneously the moral aspect (perception of corruption) and cognitive aspect (tax education) as determinants of attitudes towards tax policy, which have not been studied simultaneously in the Indonesian context.

Research Results: The results show that perceptions of corruption have a significant influence on students' attitudes. These perceptions can shape attitudes that either support or oppose tax policies, depending on how students assess the integrity and transparency of the government. Meanwhile, tax education does not show a significant influence on students' attitudes toward supporting tax policies. This suggests that technical understanding alone may not be sufficient to shape certain attitudes, as there are other factors at play, such as personal experiences and environmental context.

Implication: These findings indicate the importance of improving the quality of taxation education that is more applicable and the integration of anti-corruption values in the academic environment. In addition, the government and tax authorities need to take a more participatory and creative communication approach in socializing tax policies to the younger generation to increase their fiscal trust and participation in the future.

Copyright © by Author(s)



OPEN ACCESS

This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license

Corresponding Author:

Arif Rahman Budi Santoso

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

arifrahman.bs@gmail.com

Pendahuluan

Penelitian mengenai sikap mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan perpajakan, bertujuan untuk memahami respons dan kecenderungan mahasiswa dalam menilai serta menyikapi kebijakan fiskal negara. Menurut Kavoura dkk. (2017), sikap merupakan kecenderungan evaluatif individu terhadap suatu objek, orang, peristiwa, atau gagasan, yang mencakup aspek afektif (perasaan), kognitif (pikiran), dan konatif (perilaku). Dengan demikian, sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak dapat dipahami sebagai reaksi subjektif yang kompleks, melibatkan emosi, pemikiran, dan tindakan terhadap sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah.

Masalah utama dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pengelola pajak, yang sering dikaitkan dengan tingginya tingkat korupsi serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas fiskal. Topik ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya kebijakan pajak yang dinilai kurang adil dan membebani, terutama oleh kalangan mahasiswa yang di masa mendatang akan menjadi bagian dari wajib pajak. Persepsi negatif ini dapat berdampak pada potensi penerimaan negara, mengingat pajak merupakan komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data dari KemenKeu (2024) menunjukkan bahwa target penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai Rp2.309.859 miliar atau 82% dari total pendapatan negara, dengan lebih dari setengahnya berasal dari pajak penghasilan. Fakta ini menggarisbawahi vitalnya peran pajak dalam mendanai penyelenggaraan negara serta menegaskan urgensi membangun persepsi positif terhadap pajak di kalangan generasi muda.

Dalam perspektif sosiologis, sikap merupakan indikator penting dalam respons masyarakat terhadap isu publik, termasuk perpajakan. Sikap tidak bersifat statis, melainkan dapat mempengaruhi perilaku nyata seperti kepatuhan atau penolakan terhadap peraturan. Dalam konteks perpajakan, keyakinan terhadap pentingnya pajak serta kepercayaan kepada pemerintah menjadi penentu apakah seseorang akan mendukung atau menolak kebijakan perpajakan tersebut. Berdasarkan data (OECD, 2023), rasio pajak Indonesia hanya mencapai 12,1% dari PDB pada 2022, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik yang mencapai 19,3%. Kesenjangan ini menandakan lemahnya efektivitas sistem perpajakan Indonesia, yang disinyalir dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran, pendidikan pajak, dan isu korupsi.

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat terdidik memiliki potensi besar untuk memainkan peran strategis dalam peningkatan kepatuhan pajak. Mereka tidak hanya berperan sebagai agen kritik, tetapi juga sebagai pendukung kebijakan yang bijak dan adil. Sikap positif mahasiswa terhadap pajak dapat menjadi modal penting untuk mendorong kepatuhan di masa depan (Taing & Chang, 2021). Pendidikan tinggi memberikan bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami urgensi dan kompleksitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, pembentukan sikap positif sejak dini terhadap pajak merupakan langkah preventif untuk menekan resistensi fiskal di masa depan.

Selain itu, partisipasi aktif mahasiswa dalam isu transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak menjadi penting. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui kegiatan advokasi dan pengawasan sosial terhadap praktik pengelolaan pajak, yang sering kali tersandung isu korupsi. Dalam hal ini, dukungan terhadap kebijakan perpajakan yang adil dan transparan merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas (Anjani et al., 2023).

Berdasarkan data PDDIKTI (Rouf et al., 2022), terdapat 9.320.410 mahasiswa aktif di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah ini menggambarkan potensi besar mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memahami sikap mahasiswa dalam upaya merumuskan pendekatan komunikasi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak adalah pendidikan perpajakan. Pendidikan ini mencakup pengetahuan sistem perpajakan, regulasi yang berlaku, serta peran pajak dalam pembangunan nasional (Wijayanti & Ekowati, 2022). Pendidikan perpajakan dapat ditempuh secara formal melalui jalur akademik maupun secara nonformal melalui pelatihan seperti kursus brevet yang diselenggarakan oleh

lembaga profesional. Pembelajaran ini bertujuan membentuk pemahaman menyeluruh yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif agar mahasiswa mampu berperan aktif dalam mendukung sistem perpajakan.

Namun, sejumlah penelitian menemukan bahwa meskipun pendidikan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, pemahaman mahasiswa terhadap teknis perpajakan masih tergolong rendah, terutama karena pendekatan pengajaran yang masih dominan teoritis dan kurang pengalaman praktik (Hidayati dkk., 2023; Yusoff dkk., 2022). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pengetahuan konseptual dan implementasi nyata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kurikulum yang menekankan pendekatan berbasis pengalaman agar mahasiswa tidak hanya memahami pentingnya pajak, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dalam melaksanakannya (Albert & Fadjaranie, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi sikap mahasiswa adalah persepsi terhadap tingkat korupsi di institusi pemerintah. Persepsi ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah kebijakan perpajakan berpihak kepada masyarakat atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak (Heryadi et al., 2022). Mahasiswa, sebagai kelompok yang kritis terhadap kebijakan publik, memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu integritas dan keadilan sosial. Oleh karena itu, persepsi terhadap korupsi dapat secara langsung mempengaruhi sikap mereka terhadap kebijakan pajak dan tingkat kepatuhan fiskal.

Dua faktor utama yang relevan untuk diteliti dari uraian di atas adalah persepsi korupsi dan pendidikan perpajakan. Persepsi terhadap korupsi mencerminkan sejauh mana mahasiswa menilai sistem perpajakan bebas dari penyimpangan dan penyelewengan. Ketika tingkat persepsi korupsi tinggi, kepercayaan terhadap keadilan kebijakan pajak dapat menurun drastis. Di sisi lain, pendidikan perpajakan berfungsi sebagai sarana kognitif untuk membentuk pemahaman dan sikap terhadap sistem pajak yang berlaku.

Meskipun persepsi terhadap korupsi dan pendidikan perpajakan telah banyak dikaji dalam studi perilaku kepatuhan pajak, kajian yang menggabungkan keduanya secara simultan dalam konteks sikap mahasiswa di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti satu variabel secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif tentang pembentukan sikap fiskal generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara bersamaan bagaimana persepsi moral (terhadap korupsi) dan aspek kognitif (pendidikan perpajakan) mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi terhadap korupsi dan pendidikan perpajakan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah.

Pengembangan Hipotesis

Persepsi Korupsi terhadap Sikap Mahasiswa dalam Mendukung Kebijakan Pajak Pemerintah

Pandangan mahasiswa terhadap keberadaan korupsi dalam tubuh pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga negara. Ketika mahasiswa terpapar informasi mengenai praktik korupsi yang meluas, hal tersebut cenderung membentuk persepsi negatif terhadap legitimasi pemerintah, termasuk kebijakan yang dikeluarkan. Natalia (2019), menemukan bahwa mahasiswa dengan persepsi tinggi terhadap tingkat korupsi cenderung memiliki keraguan terhadap integritas pemerintah serta meragukan efektivitas inisiatif transparansi dan akuntabilitas yang sedang dijalankan. Kondisi ini dapat menimbulkan sikap apatis secara politik, di mana mahasiswa merasa bahwa partisipasi mereka tidak berdampak nyata terhadap perubahan sistem.

Persepsi terhadap korupsi memengaruhi tingkat kepercayaan individu terhadap negara, khususnya dalam konteks kebijakan perpajakan. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), kepercayaan terhadap pemerintah memengaruhi norma subjektif serta persepsi atas kontrol perilaku. Ketika mahasiswa meyakini bahwa dana pajak yang dibayarkan rawan disalahgunakan akibat korupsi, mereka cenderung mengembangkan norma subjektif yang negatif terhadap kepatuhan pajak serta merasa tidak memiliki kendali atas alokasi penggunaan dana publik.

Penelitian ini mengukur persepsi terhadap korupsi dengan pendekatan melalui pernyataan-pernyataan yang menyoroti aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sistem pajak dalam mencegah korupsi. Mahasiswa diminta menilai sejauh mana mereka percaya bahwa sistem pengelolaan pajak telah dijalankan dengan baik, didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif, serta sejauh mana upaya pemberantasan korupsi dianggap berjalan secara optimal. Melalui pendekatan ini,

diharapkan dapat menggambarkan seberapa besar kepercayaan mahasiswa terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah.

Temuan ini sejalan dengan studi Widya dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa persepsi korupsi yang tinggi berdampak terhadap penurunan kepatuhan serta dukungan terhadap kebijakan perpajakan. Namun, berbeda dengan temuan Denisova-Schmidt dkk. (2016) yang menyimpulkan bahwa persepsi korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa, karena adanya variabel lain yang lebih kompleks memengaruhi pembentukan sikap tersebut. Dengan demikian, dalam perspektif TPB, persepsi mahasiswa terhadap tingkat korupsi dalam sistem perpajakan dapat membentuk sikap mereka terhadap kebijakan pajak, baik secara positif maupun negatif. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah dapat memunculkan sikap positif terhadap kebijakan pajak, sedangkan persepsi akan maraknya korupsi dapat menurunkan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Rendahnya *perceived behavioral control* atas efektivitas sistem perpajakan juga turut menurunkan motivasi kepatuhan mahasiswa terhadap kebijakan pajak. **Hipotesis: H1:** Persepsi korupsi berpengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah.

Pendidikan Perpajakan terhadap Sikap Mahasiswa dalam Mendukung Kebijakan Pajak Pemerintah

Pendidikan perpajakan memiliki kontribusi penting dalam membentuk pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap fungsi strategis pajak dalam pembangunan nasional. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki dampak luas terhadap sektor infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Melalui pendidikan perpajakan, mahasiswa diharapkan memahami tidak hanya prosedur pemungutan pajak, tetapi juga bagaimana alokasi pajak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indriani et al., 2024).

Dalam perspektif Teori Kognitif Sosial (Bandura, 1986), proses pembelajaran terjadi melalui interaksi antara faktor personal, lingkungan, dan perilaku. Pendidikan perpajakan tidak terbatas pada pembelajaran formal, tetapi juga melalui pengalaman sosial, diskusi akademik, serta keterpaparan terhadap kebijakan yang diterapkan di lingkungan mereka. Mahasiswa yang mendapatkan pendidikan perpajakan cenderung memiliki pemahaman yang lebih tuntas tentang hak dan kewajiban perpajakan serta kerangka regulasi yang berlaku.

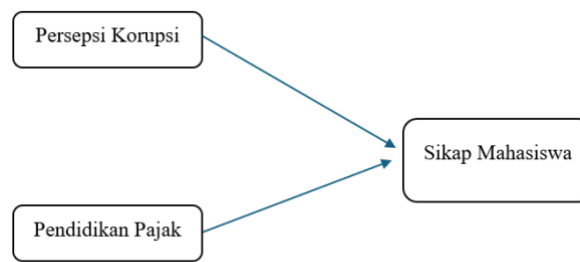
Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan perpajakan dapat membentuk pola pikir yang lebih positif dan kritis terhadap kewajiban perpajakan. Sebagaimana disampaikan oleh Yuliana & Isharijadi (2014), kesadaran akan pentingnya keadilan dalam sistem pajak sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima. Pendidikan yang baik dapat memberikan pengetahuan yang memadai dan menjadi fondasi bagi perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan di kehidupan nyata (Prasetyo & Putri, 2023).

Secara lingkungan, interaksi mahasiswa dengan dosen, teman sebaya, maupun praktisi perpajakan memberikan kontribusi terhadap sikap mereka terhadap pajak. Proses sosialisasi ini tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga membangun norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak (Wardani & Wati, 2018).

Dari sisi perilaku, partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan seperti seminar, workshop, atau praktik pelaporan pajak (misalnya pengisian SPT) dapat meningkatkan sikap positif terhadap kebijakan pajak. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung yang memperkuat pemahaman dan kesadaran sebagai calon wajib pajak. Beberapa studi menyatakan bahwa keterlibatan dalam kegiatan edukatif dan praktik langsung memberikan dampak signifikan terhadap sikap dan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan perpajakan (Muntyati et al., 2024).

Penelitian ini didukung oleh temuan Zhang, (2021), yang mengungkapkan bahwa pendidikan perpajakan yang tinggi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dan dukungan kebijakan pajak. Sebaliknya, Yusoff dkk., (2022) menyatakan bahwa pendidikan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa karena pengaruh kuat dari faktor pengalaman pribadi.

Berdasarkan kerangka Teori Kognitif Sosial, pendidikan perpajakan memberikan kontribusi terhadap pembentukan pemahaman dan sikap melalui proses pembelajaran, observasi, serta pengalaman langsung. Pemahaman mahasiswa tentang pajak dapat membentuk sikap yang beragam terhadap kebijakan perpajakan, tergantung pada pengalaman dan persepsi yang mereka miliki. Oleh karena itu, pendidikan perpajakan menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran dan dukungan mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah. **Hipotesis: H2:** Pendidikan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah. Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

- H1: Persepsi korupsi berpengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah
- H2: Pendidikan Pajak berpengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner online. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu secara sistematis, dengan proses deduktif yang diawali dari teori hingga pengujian hipotesis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengevaluasi apakah hipotesis penelitian terbukti atau tidak. Metode ini dipilih karena seluruh data yang digunakan berbentuk angka dan memerlukan analisis statistik sebagai alat interpretasi.

Objek dalam penelitian ini mencakup hubungan antara pendidikan perpajakan, persepsi korupsi, dan sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah. Sementara itu, subjek penelitian adalah mahasiswa program studi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur yang telah memperoleh pendidikan perpajakan secara formal maupun nonformal, serta memiliki pengalaman atau pemahaman terkait isu korupsi. Populasi dari penelitian ini adalah sebesar **1031 mahasiswa** yang dimana penentuan sampel dilakukan melalui teknik convenience sampling dengan menggunakan dasar rumus slovin dengan margin 10%, dengan tetap mempertimbangkan variasi strata berdasarkan angkatan mahasiswa, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Teknik ini dipilih untuk memastikan keterwakilan yang seimbang dari setiap strata populasi dan menghindari bias berlebih. Dengan menggunakan teknik tersebut maka didapatkan jumlah sampel minimum adalah **91 mahasiswa**. Namun untuk meningkatkan reliabilitas data, peneliti memutuskan untuk menetapkan jumlah sampel sebanyak minimal **100 mahasiswa**. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya data yang tidak lengkap atau tidak valid, serta memberikan ruang lebih bagi keberagaman responden dalam pengisian kuesioner.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring (online questionnaire) yang menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju". Skala ini dipilih karena kemudahannya dalam digunakan oleh responden serta fleksibilitasnya dalam mengukur sikap terhadap berbagai isu, seperti persepsi sosial dan tingkat persetujuan terhadap kebijakan tertentu (Allen & Seaman, 2007). Kuesioner daring memungkinkan penyebaran data secara luas, cepat, dan hemat biaya, serta memberikan kemudahan akses bagi responden untuk mengisi survei kapan pun dan di mana pun mereka berada (Wright, 2005).

Tahap analisis data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4 dengan metode Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). SEM memungkinkan analisis simultan terhadap hubungan antar konstruk laten, yang diukur melalui berbagai item dalam kuesioner. Validitas dan reliabilitas alat ukur diuji melalui model pengukuran (outer model), yang mencakup convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Selain itu, model struktural (inner model) digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten melalui pengukuran nilai R-squared dan effect size (f^2), yang bertujuan menilai kekuatan dan signifikansi pengaruh antar variabel. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh untuk menilai secara empiris keterkaitan antara pendidikan perpajakan, persepsi korupsi, dan sikap mahasiswa terhadap pajak.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Ikhtisar Pengambilan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner daring melalui platform Google Form, yang disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Instrumen kuesioner ditujukan kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jawa Timur, khususnya angkatan tahun 2021 hingga 2023. Kriteria responden adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan, baik secara formal maupun nonformal. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, jumlah minimum sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 responden.

Dari hasil pengumpulan data, sebanyak 125 kuesioner berhasil dibagikan dan seluruhnya berhasil diisi oleh responden, menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 100%. Namun, setelah dilakukan proses verifikasi, terdapat satu kuesioner yang tidak memenuhi kriteria penelitian, sehingga tidak dapat diolah lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang layak untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 124, atau setara dengan 99% dari total kuesioner yang terkumpul (Terlampir pada Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuisisioner Dibagi	125	100%
Kuisisioner Terisi	125	100%
Kuisisioner dapat diolah	124	99%

Karakteristik Responden

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap populasi yang diteliti, dilakukan pengelompokan karakteristik responden berdasarkan tiga kategori utama, yaitu jenis kelamin, angkatan masuk perguruan tinggi, dan pengalaman mengikuti pendidikan perpajakan. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 69 responden atau 56% merupakan perempuan, sedangkan 55 responden atau 44% merupakan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan mendominasi sampel penelitian.

Tabel 2. Jumlah Berdasarkan Angkatan Masuk

Angkatan Masuk	Jumlah	Persentase
2021	46	37%
2022	45	36%
2023	33	27%

Sumber : Peneliti

Jika ditinjau dari sisi angkatan masuk (Tabel 2), responden terbanyak berasal dari angkatan 2021 dengan jumlah 46 orang (37%), diikuti oleh angkatan 2022 sebanyak 45 orang (36%), dan angkatan 2023 sebanyak 33 orang (27%). Sementara itu, seluruh responden dalam penelitian ini, yaitu 124 orang atau 100%, tercatat pernah mengikuti pendidikan perpajakan, baik melalui jalur formal di perkuliahan maupun secara informal melalui pelatihan atau seminar. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh responden telah memiliki pengetahuan dasar terkait isu perpajakan, sehingga memenuhi syarat sebagai partisipan yang relevan dalam penelitian ini.

Respon Setiap Variabel

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 3), mayoritas mahasiswa memiliki persepsi negatif terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah. Mereka meragukan penggunaan pajak untuk kepentingan umum, menilai masih adanya penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta kurangnya transparansi dan efektivitas sistem pengawasan. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang tidak setuju bahwa dana pajak dikelola secara adil dan transparan, serta hukuman terhadap pelaku korupsi dianggap belum setimpal. Meski begitu, mahasiswa cukup terpapar dengan

pemberitaan media terkait kasus korupsi pajak, yang menunjukkan adanya kesadaran kritis terhadap isu ini.

Tabel 3. Rangkuman Respons Variabel Persepsi Korupsi

Item	Indikator	1	2	3	4	5	Total
X1.1	Saya percaya bahwa dana pajak yang saya bayarkan digunakan untuk kepentingan publik.	40	26	15	22	21	124
X1.2	Saya merasa dana pajak tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	27	47	18	16	16	124
X1.3	Saya merasa proses pengelolaan dana pajak oleh pemerintah dilakukan secara transparan.	23	52	21	17	11	124
X1.4	Saya yakin bahwa mekanisme pengawasan pengelolaan dana pajak sudah berjalan dengan baik	36	43	13	21	11	124
X1.5	Saya sering mendengar pemberitaan media tentang kasus korupsi yang melibatkan dana pajak.	4	5	7	40	68	124
X1.6	Saya merasa pemberitaan kasus korupsi dana pajak mencerminkan lemahnya pengawasan.	4	6	6	39	69	124
X1.7	Saya merasa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi dana pajak sudah sesuai dengan kesalahannya.	47	40	16	12	9	124
X1.8	Saya percaya bahwa pemerintah menindak tegas pelaku korupsi dana pajak.	33	44	21	17	9	124

Sumber : Peneliti

Di sisi lain, sikap terhadap kewajiban membayar pajak relatif positif. Sebagian besar responden mengakui pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dan mendukung kebijakan fiskal pemerintah selama kebijakan tersebut dianggap adil. Motif kepatuhan mereka dipengaruhi baik oleh kesadaran moral maupun ketakutan terhadap sanksi hukum. Namun, persepsi terhadap keadilan sistem pajak dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan masih bervariasi, dengan sebagian responden bersikap netral atau skeptis terhadap efektivitas dan keterbukaan sistem yang ada.

Tabel 4. Rangkuman Respons Variabel Pendidikan Perpajakan

Item	Indikator	1	2	3	4	5	Total
X2.1	Saya memahami jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia.	9	0	8	54	53	124
X2.2	Saya mengetahui tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan pribadi dan PPN.	0	9	15	49	51	124
X2.3	Saya memahami kebijakan terbaru mengenai tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	3	8	20	51	42	124
X2.4	Saya memahami dampak perubahan kebijakan pajak terhadap keuangan pribadi atau bisnis.	8	1	18	60	37	124
X2.5	Saya aktif mengikuti seminar atau workshop tentang perpajakan.	4	12	31	38	39	124

X2.6	Saya merasa kegiatan edukasi perpajakan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman saya.	1	8	14	46	55	124
X2.7	Saya merasa kegiatan edukasi perpajakan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman saya..	2	7	26	49	40	124
X2.8	Saya mengetahui sumber-sumber informasi resmi yang dapat diandalkan untuk memahami perpajakan.	3	7	15	52	47	124

Terkait edukasi perpajakan (Tabel 4), mayoritas mahasiswa menunjukkan pemahaman yang baik mengenai jenis pajak, tarif yang berlaku, dan kebijakan terbaru seperti perubahan tarif PPN. Mereka juga memahami dampak perubahan kebijakan terhadap kondisi ekonomi pribadi atau bisnis. Namun, meskipun pengetahuan dasar tergolong kuat, tingkat partisipasi dalam kegiatan edukatif seperti seminar pajak masih rendah, menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan aktif agar pengetahuan mereka dapat lebih aplikatif dalam mendukung sistem perpajakan yang berintegritas.

Tabel 5. Rangkuman Respons Variabel Sikap Mahasiswa dalam Mendukung Kebijakan Pajak Pemerintah

Item	Indikator	1	2	3	4	5	Total
Y1	Saya bersedia membayar pajak ketika sudah memiliki penghasilan di masa depan.	8	1	7	39	69	124
Y2	Saya merasa membayar pajak adalah tanggung jawab sebagai warga negara.	1	8	8	44	63	124
Y3	Saya mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tarif pajak untuk pembangunan infrastruktur.	32	39	13	20	20	124
Y4	Saya merasa kebijakan pajak pemerintah sudah adil dan proporsional.	40	37	17	16	14	124
Y5	Saya percaya bahwa sistem pajak di Indonesia sudah dikelola dengan baik.	31	47	21	11	14	124
Y6	Saya merasa sistem pajak saat ini transparan dan akuntabel.	27	51	21	17	8	124
Y7	Saya mematuhi kewajiban pajak karena ingin berkontribusi pada pembangunan negara.	34	29	11	23	27	124
Y8	Saya taat membayar pajak karena takut terkena sanksi hukum.	23	11	13	40	37	124
Y9	Saya merasa kebijakan pajak saat ini masih memberatkan masyarakat menengah ke bawah.	2	7	18	42	55	124
Y10	Saya sering memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan pajak yang tidak adil.	9	21	28	31	35	124

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas responden menunjukkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sebagaimana tercermin pada indikator Y1 dan Y2. Sebagian besar responden menyatakan kesiapan membayar pajak di masa depan dan memandang pajak sebagai tanggung jawab

kewarganegaraan. Dukungan terhadap kebijakan fiskal juga terlihat dalam indikator Y3, meskipun persepsi terhadap keadilan sistem pajak masih beragam sebagaimana ditunjukkan pada Y4. Di sisi lain, indikator Y5 dan Y6 mengungkapkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan, dengan banyak responden menunjukkan sikap skeptis. Ini menandakan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya pajak cukup tinggi, kepercayaan terhadap pelaksanaannya masih perlu diperkuat.

Selanjutnya, indikator Y7 dan Y8 memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh motif moral dan ketakutan terhadap sanksi hukum. Responden cenderung mematuhi kewajiban pajak karena memahami peran pajak dalam pembangunan, sekaligus karena khawatir akan konsekuensi hukum. Perspektif kritis mahasiswa terhadap kebijakan pajak tercermin dalam indikator Y9 dan Y10. Meski sebagian besar responden bersikap netral terhadap anggapan bahwa pajak merugikan kelompok tertentu, terdapat pula kelompok yang aktif memberikan kritik atau saran terhadap kebijakan pajak yang dianggap tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mematuhi aturan secara pasif, tetapi juga menunjukkan kepedulian kritis terhadap keadilan dan efektivitas sistem perpajakan yang berlaku.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai tanggapan responden terhadap tiga variabel utama, yaitu persepsi korupsi (X1), pendidikan perpajakan (X2), dan sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah (Y). Pada variabel persepsi korupsi, skor rata-rata berkisar antara 2,161 hingga 4,315 dengan standar deviasi yang menunjukkan tingkat keragaman jawaban cukup tinggi. Nilai kurtosis yang cenderung negatif mengindikasikan distribusi jawaban yang tersebar (platykurtik), mencerminkan beragamnya pandangan mahasiswa terhadap transparansi dan keadilan pengelolaan dana pajak. Tabel 6 menunjukkan Hasil Statistik Deskriptive.

Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptive

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis
X1.1	2.661	1.000	5.000	1.497	-1.386
X1.2	2.573	1.000	5.000	1.309	-0.804
X1.3	2.524	1.000	5.000	1.195	-0.504
X1.4	2.419	1.000	5.000	1.302	-0.830
X1.5	4.315	1.000	5.000	0.979	2.995
X1.6	4.315	1.000	5.000	0.995	2.828
X1.7	2.161	1.000	5.000	1.234	-0.121
X1.8	2.395	1.000	5.000	1.217	-0.562
X2.1	4.145	1.000	5.000	1.060	3.059
X2.2	4.145	2.000	5.000	0.895	0.111
X2.3	3.976	1.000	5.000	0.988	0.648
X2.4	3.944	1.000	5.000	1.026	2.038
X2.5	3.774	1.000	5.000	1.091	-0.379
X2.6	4.177	1.000	5.000	0.925	0.756
X2.7	3.952	1.000	5.000	0.949	0.268
X2.8	4.073	1.000	5.000	0.969	1.230
Y1	4.290	1.000	5.000	1.068	3.386
Y2	4.290	1.000	5.000	0.905	1.632
Y3	2.653	1.000	5.000	1.426	-1.207
Y4	2.411	1.000	5.000	1.350	-0.818
Y5	2.435	1.000	5.000	1.265	-0.429
Y6	2.419	1.000	5.000	1.158	-0.388
Y7	2.839	1.000	5.000	1.537	-1.517
Y8	3.460	1.000	5.000	1.461	-1.041
Y9	4.137	1.000	5.000	0.970	0.724
Y10	3.500	1.000	5.000	1.260	-0.949

Sumber : Peneliti

Untuk variabel pendidikan perpajakan, skor rata-rata tergolong tinggi (3,944–4,290) dengan standar deviasi rendah, menandakan tingkat pemahaman yang cukup baik dan relatif seragam di antara responden. Nilai kurtosis positif pada beberapa item, seperti X2.1, menunjukkan jawaban yang cenderung mengelompok di sekitar rata-rata (leptokurtik), yang berarti sebagian besar mahasiswa merasa telah mendapatkan cukup informasi tentang perpajakan baik secara formal maupun informal.

Pada variabel sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak pemerintah, skor rata-rata menunjukkan variasi yang cukup besar (2,653–4,177). Skor terendah muncul pada item Y3, yang menandakan masih adanya keraguan atau ketidakpastian mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak. Variasi jawaban juga tercermin dari standar deviasi yang cukup tinggi pada beberapa item. Nilai excess kurtosis yang sebagian besar berada dalam kisaran normal menunjukkan bahwa data cenderung terdistribusi secara normal. Secara keseluruhan, temuan ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi dan sikap mahasiswa terhadap kebijakan pajak, namun dengan tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap materi perpajakan.

Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Uji validitas dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana indikator-indikator dari suatu konstruk mampu merepresentasikan konstruk tersebut secara konsisten. Suatu indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai loading factor $\geq 0,7$. Namun, dalam konteks studi eksploratif, nilai antara 0,5 hingga 0,7 masih dapat diterima, sementara indikator dengan nilai negatif atau jauh di bawah 0,5 perlu dikeluarkan dari model. Berdasarkan hasil outer loading, sebagian besar indikator memenuhi kriteria kelayakan validitas konvergen. Pada variabel Persepsi Korupsi (X1), enam dari delapan indikator menunjukkan nilai valid, yakni X1.1 (0,745), X1.2 (0,810), X1.3 (0,834), X1.4 (0,865), X1.7 (0,793), dan X1.8 (0,766).

Sebaliknya, dua indikator, yaitu X1.5 (-0,767) dan X1.6 (-0,655), memiliki nilai negatif dan tidak memenuhi kriteria validitas, sehingga dihapus dari model. Variabel Pendidikan Perpajakan (X2) menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana seluruh indikator (X2.1 hingga X2.8) memiliki nilai loading factor antara 0,734 hingga 0,869, yang berarti seluruhnya valid dan tidak memerlukan penghapusan. Adapun pada variabel Sikap Mahasiswa terhadap Kebijakan Pajak Pemerintah (Y), enam indikator memenuhi kriteria validitas, yaitu Y4 (0,815), Y5 (0,823), Y6 (0,813), Y7 (0,794), Y8 (0,805), dan Y9 (0,783). Namun, terdapat empat indikator yang tidak valid, yaitu Y1 (-0,602), Y2 (-0,459), Y3 (-0,566), dan Y10 (-0,706), yang kemudian dihapus dari model. Setelah penghapusan indikator-indikator yang tidak valid, nilai Average Variance Extracted (AVE) dan outer loading indikator yang tersisa tetap berada di atas ambang batas yang disarankan, sehingga validitas konvergen secara keseluruhan terpenuhi.

Tabel 7. Hasil HTMT setelah Modifikasi

	X1	X2	Y
X1			
X2	0,539		
Y	0,895	0,432	

Sumber : Peneliti

Validitas diskriminan dievaluasi menggunakan metode Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT) (Terlampir pada Tabel 7). Pada tahap awal, nilai HTMT antara konstruk Persepsi Korupsi (X1) dan Sikap Mahasiswa terhadap Kebijakan Pajak Pemerintah (Y) mencapai 0,942, yang melampaui batas toleransi maksimum (0,85–0,90) untuk studi eksploratif. Oleh karena itu, dilakukan penghapusan beberapa indikator yang tidak signifikan, sehingga nilai HTMT menurun menjadi 0,895 dan berada dalam batas yang dapat diterima. Sementara itu, nilai HTMT antara konstruk X1 dan X2 adalah 0,539, serta antara X2 dan Y sebesar 0,432, yang keduanya menunjukkan validitas diskriminan yang sangat baik.

Proses penghapusan indikator tersebut tidak memengaruhi signifikansi pengujian hipotesis dan tidak mengubah nilai outer loading serta AVE secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini secara empiris dapat dibedakan dan merepresentasikan konsep yang berbeda, meskipun korelasi tinggi antara X1 dan Y memerlukan evaluasi lanjutan terkait definisi operasional masing-masing konstruk. Secara keseluruhan, struktur pengukuran model telah memenuhi validitas konvergen dan diskriminan, serta layak digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya. Tabel 8 menunjukkan hasil Outer Loading dan AVE setelah Modifikasi HTMT.

Tabel 8. Outer Loading dan AVE setelah Modifikasi HTMT

Variabel	Item	X1	X2	Y	AVE	Keterangan
Persepsi Korupsi	X1.1	0,800			0,685	Valid
	X1.2	0,831				
	X1.7	0,794				
	X1.8	0,779				
Pendidikan Perpajakan	X2.1		0,871		0,627	Valid
	X2.2		0,732			
	X2.3		0,737			
	X2.4		0,830			
	X2.6		0,790			
	X2.7		0,783			
	X2.8		0,788			
		Y4				
Sikap Mahasiswa	Y5			0,880	0,754	Valid
	Y6			0,850		
	Y7			0,850		

Sumber : Peneliti

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability untuk mengevaluasi konsistensi internal indikator (Tabel 9). Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua konstruk memenuhi syarat reliabilitas pengukuran. Variabel Persepsi Korupsi memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,846 dan Composite Reliability sebesar 0,897. Variabel Pendidikan Perpajakan menunjukkan nilai yang lebih tinggi, dengan Cronbach's Alpha sebesar 0,900 dan Composite Reliability sebesar 0,921. Sementara itu, variabel Sikap Mahasiswa terhadap Kebijakan Pajak Pemerintah memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,894 dan Composite Reliability sebesar 0,926. Nilai-nilai tersebut melebihi batas minimum yang disarankan, yaitu 0,7 untuk Cronbach's Alpha dan 0,6 untuk Composite Reliability. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi, yang memperkuat validitas instrumen dan menjamin kestabilan serta keandalan hasil analisis dan penarikan kesimpulan.

Tabel 9. Hasil Cronach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Persepsi Korupsi	0,846	0,897
Pendidikan Perpajakan	0,900	0,921
Sikap Mahasiswa	0,894	0,926

Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)

Pada tahap analisis model struktural (inner model) dalam pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), dilakukan beberapa pengujian penting untuk memastikan keandalan dan validitas model dalam menjelaskan hubungan antar konstruk. Salah satu pengujian awal adalah uji kolinearitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas antar variabel laten independen yang dapat memengaruhi estimasi koefisien jalur. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan bias dan menurunkan keakuratan model. Mengacu pada pendapat Hair et al. (2017), nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) harus berada di bawah ambang batas 5,0 untuk menunjukkan tidak adanya

masalah kolinearitas. Berdasarkan hasil uji kolinearitas yang disajikan dalam Tabel 10, nilai VIF untuk variabel Persepsi Korupsi (X1) dan Pendidikan Perpajakan (X2) terhadap variabel Sikap Mahasiswa (Y) masing-masing sebesar 1,285. Nilai ini jauh di bawah ambang batas, menandakan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas, sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian struktural berikutnya.

Tabel 10. Hasil VIF Inner Model

	VIF
X1 -> Y	1.285
X2 -> Y	1.285

Sumber : Peneliti

Selanjutnya, dilakukan pengujian koefisien determinasi (R-Square) untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen. Berdasarkan analisis yang ditunjukkan dalam Tabel 11, nilai *R-Square* sebesar 0,613 mengindikasikan bahwa 61,3% variasi dari sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah dapat dijelaskan oleh persepsi korupsi dan pendidikan perpajakan. Nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,607 turut menunjukkan kestabilan model setelah disesuaikan dengan jumlah prediktor. Menurut Hair et al. (2017), nilai R-Square di atas 0,50 dapat dikategorikan sebagai model yang cukup kuat dalam konteks penelitian sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki kemampuan penjelas yang baik terhadap variabel terikat.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

	R Square	R-Square Adjusted
Sikap Mahasiswa	0,613	0,607

Sumber :Peneliti

Untuk mengukur kemampuan prediktif model terhadap data di luar sampel, dilakukan uji predictive relevance (Q^2 Predict) menggunakan fitur PLS-Predict dalam perangkat lunak SmartPLS 4. Nilai Q^2 sebesar 0,593 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik karena nilai tersebut positif dan mendekati angka 1. Hasil ini diperkuat oleh nilai kesalahan prediksi yang relatif rendah, yakni *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 0,650 dan *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar 0,461. Berdasarkan interpretasi dari Hair et al. (2021), nilai Q^2 yang positif menunjukkan bahwa model relevan secara prediktif. Dengan demikian, model dalam penelitian ini tidak hanya memiliki daya jelaskan yang memadai, tetapi juga memiliki akurasi prediktif yang tinggi, menjadikannya layak untuk digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan terkait. Tabel 12 menunjukkan Hasil *Path-Coefficients*.

Tabel 12. Hasil Path-Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Persepsi Korupsi -> Sikap Mahasiswa	0,765	0,764	0,054	14,264	0,000
Pendidikan Perpajakan -> Sikap Mahasiswa	-0,036	-0,042	0,066	0,552	0,581

Sumber : Peneliti

Terakhir, dilakukan pengujian hipotesis untuk menilai apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat signifikan secara statistik. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96 dan *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, diketahui bahwa persepsi korupsi berpengaruh signifikan

terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,765, t-statistic sebesar 14,264, dan p-value sebesar 0,000.

Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Sebaliknya, pendidikan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, dengan nilai koefisien sebesar -0,036, t-statistic sebesar 0,552, dan p-value sebesar 0,581 yang jauh di atas ambang signifikansi. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) ditolak. Secara keseluruhan, hasil uji model struktural ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki struktur yang layak, bebas dari masalah kolinearitas, memiliki kemampuan prediksi dan penjelasan yang baik, serta memberikan temuan yang signifikan terhadap sebagian hipotesis yang diajukan.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Sikap Mahasiswa dalam Mendukung Kebijakan Pajak Pemerintah

Dapat dilihat hasil daripada pengetesan hipotesis yang pertama menampilkan bahwa variabel persepsi korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah yang dapat dinilai dari koefisien jalur sebesar 0,765 dan P-value sebesar 0,000. Hasil ini dapat disimpulkan memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti (Rosid et al., 2018) dan (Tanadji, 2024), serta memperkuat argumen (Mardhiah, 2021) dimana persepsi korupsi dapat memengaruhi kepercayaan atas sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak, yang dimana sikap ini merupakan salah satu bagian dari faktor pembentuk kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah.

Jika mengacu pada Theory of Planned Behavior (TPB) milik Icek Ajzen, sikap terhadap suatu perilaku merupakan salah satu determinan utama dari niat (intention) untuk bertindak. Dalam hal ini, persepsi korupsi dapat memengaruhi sikap mahasiswa sebagai bentuk evaluasi kognitif terhadap pentingnya kebijakan perpajakan dalam menciptakan keadilan dan tata kelola yang baik. Ketika mahasiswa memandang bahwa kebijakan pajak berperan dalam mengatasi praktik korupsi dan mendukung pembangunan, maka sikap mereka terhadap pajak akan semakin positif, yang pada akhirnya mendorong intensi mereka untuk mendukung dan patuh terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, temuan ini sejalan dengan kerangka TPB, di mana keyakinan tentang konsekuensi suatu tindakan (behavioral belief) membentuk sikap terhadap tindakan tersebut.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa faktor moral seperti persepsi terhadap korupsi memiliki hubungan yang signifikan terhadap sikap mahasiswa. Hal ini dapat dijelaskan karena persepsi terhadap integritas pemerintah berkaitan langsung dengan kepercayaan terhadap institusi negara, yang menjadi dasar dari legitimasi kebijakan. Mahasiswa yang memiliki persepsi positif terhadap pengelolaan pajak cenderung lebih mudah mendukung kebijakan tersebut, sedangkan mahasiswa yang memiliki pandangan negatif mungkin menunjukkan penolakan. Dengan kata lain, persepsi korupsi dapat mendorong baik dukungan maupun resistensi tergantung pada bagaimana mahasiswa memaknainya..

Pengaruh Pendidikan Perpajakan terhadap Sikap Mahasiswa dalam Mendukung Kebijakan Pajak Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pendidikan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap mahasiswa dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah. Hal ini tercermin dari nilai koefisien jalur sebesar -0,036, dengan nilai t-statistik sebesar 0,552 dan p-value sebesar 0,581, yang jauh di atas ambang signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun arah hubungan antara pendidikan perpajakan dan sikap mahasiswa bersifat negatif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak.

Jika dikaitkan dengan Social Cognitive Theory (SCT) oleh Albert Bandura (1986), pendidikan merupakan salah satu mekanisme utama dalam membentuk perilaku individu melalui proses observational learning (pembelajaran melalui pengamatan) dan self-efficacy (keyakinan diri). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa telah mendapatkan pendidikan perpajakan, hal tersebut belum tentu membentuk sikap mereka secara langsung. Kemungkinan besar, materi yang diterima belum cukup menginternalisasi nilai-nilai pentingnya pajak, atau metode

pembelajaran belum efektif dalam mendorong pengalaman belajar yang berdampak secara psikologis dan sosial.

Selain itu, menurut SCT, interaksi antara personal factors, behavioral patterns, dan environmental influences saling memengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, meskipun mahasiswa menerima pendidikan, jika lingkungan sekitarnya (misalnya praktik perpajakan di dunia nyata atau media massa) masih menunjukkan adanya ketidakadilan atau ketidakefisienan dalam sistem pajak, maka pembelajaran tersebut tidak akan cukup untuk membentuk sikap positif terhadap kebijakan pajak. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pendidikan perpajakan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa, karena belum terjadi modeling atau contoh perilaku yang mampu memperkuat hasil pembelajaran. Dengan kata lain, hasil ini mengindikasikan perlunya pendekatan pendidikan perpajakan yang lebih aplikatif, kontekstual, dan menyentuh dimensi afektif serta sosial, agar mampu membentuk sikap mahasiswa sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Social Cognitive Theory.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa. Namun, arah pengaruh tersebut dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada interpretasi dan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem perpajakan. Hal ini menegaskan bahwa aspek moral, khususnya kepercayaan terhadap tata kelola yang bersih, merupakan determinan penting dalam membentuk sikap fiskal generasi muda. Dengan kata lain, ketidakpercayaan akibat persepsi korupsi dapat menggerus legitimasi pemerintah dalam memungut pajak dan memperlemah niat mahasiswa untuk mematuhi di masa mendatang.

Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa. Meskipun sebagian besar mahasiswa telah mengikuti pendidikan perpajakan baik secara formal maupun nonformal, pemahaman teknis semata ternyata belum cukup membentuk sikap positif terhadap kebijakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang bersifat teoritis belum mampu menyentuh aspek afektif dan sosial secara mendalam. Dalam kerangka SCT, hasil ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang tidak disertai dengan pengalaman nyata, lingkungan yang mendukung, atau keteladanan dari otoritas, cenderung kurang efektif dalam memengaruhi sikap.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data hanya dikumpulkan dari satu program studi di satu perguruan tinggi negeri, sehingga generalisasi hasil ke populasi mahasiswa Indonesia secara keseluruhan masih terbatas. Kedua, penelitian ini tidak memasukkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi sikap mahasiswa, seperti faktor keluarga, media, atau pengalaman pribadi terkait layanan perpajakan. Ketiga, metode yang digunakan bersifat cross-sectional, sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan sikap secara longitudinal.

Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya upaya strategis untuk membangun kepercayaan mahasiswa terhadap sistem perpajakan, melalui pemberantasan korupsi, transparansi anggaran, serta komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif. Pendidikan perpajakan juga perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menekankan pada pendekatan praktis, kontekstual, dan berbasis nilai. Kegiatan seperti simulasi pelaporan pajak, kunjungan ke instansi perpajakan, pelatihan langsung, serta diskusi interaktif tentang kasus nyata, sangat diperlukan agar mahasiswa tidak hanya memahami fungsi pajak, tetapi juga percaya dan bersedia berkontribusi secara aktif.

Sebagai rekomendasi, pihak perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan kurikulum perpajakan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial, dengan mengintegrasikan nilai antikorupsi dan keadilan fiskal. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk melibatkan mahasiswa dalam program edukatif berbasis pengalaman dan memperbaiki citra institusi melalui transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi antara kampus, otoritas pajak, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara pajak, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam mendukung kebijakan perpajakan yang berkeadilan.

Referensi

- Albert, A., & Fadjarenie, R. A. (2022). Early Tax Education: Could It Change the Future Compliance Behavior? *International Journal of Evaluation and Research in Education (Ijere)*, 11(4), 1912. <https://doi.org/10.11591/ijere.v11i4.22241>
- Allen, I. E., & Seaman, C. A. (2007). Likert scales and data analyses. *Quality Progress*, 40(7), 64–65.
- Anjani, Y., Sukartini, S., & Djefris, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghargaan Finansial, Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untuk Berkarir Dibidang Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEL)*, 2(1), 91–102. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.53>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. In *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall, Inc.
- Denisova-Schmidt, E., Huber, M., & Leontyeva, E. (2016). On the Development of Students' Attitudes Towards Corruption and Cheating in Russian Universities. *European Journal of Higher Education*, 6(2), 128–143. <https://doi.org/10.1080/21568235.2016.1154477>
- Heryadi, A., Jayanti, A. M., & Zetta, C. V. E. (2022). Kejujuran Akademik Mahasiswa Dan Persepsi Anti Korupsi. *Psikologi Konseling*, 21(2), 1418. <https://doi.org/10.24114/konseling.v21i2.41112>
- Hidayati, B., Hermanto, F. Y., & Nnamdi, A. O. (2023). Tax education and tax compliance: A multi-ethnic analysis. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6231>
- Indriani, A., Saminem, Handayani, E., Sukardi, & Saprianto, R. (2024). Perpajakan Di Indonesia Melalui Program Sosialisasi. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 700–706.
- Kavoura, A., Danianos, P. S., & Tomaras, P. (2017). Strategic Innovative Marketing. In *In Strategic Innovative Marketing* (Issue June). <https://doi.org/10.1007/978-3-031-51038-0>
- KemenKeu. (2024). *Portal Data APBN*.
- Mardhiah. (2021). Perception of Corruption, Perception of Tax Complexity, and Financial Information Access: Extending the Analysis of the Slippery Slope Framework. *Scientax*, 2(2), 265–277. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.64>
- Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57–73.
- OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 – Indonesia Tax-to-GDP ratio Tax structures Personal income tax Social security contributions Value added taxes / Goods and services tax Other taxes on goods and services. *Oecd*, 29, 8–9.
- Prasetyo, M. S., & Putri, E. P. (2023). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di STIE Port Numbay Jayapura). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45–52.
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). Tax Non-Compliance and Perceptions of Corruption: Policy Implications for Developing Countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 25–60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1364349>
- Rouf, F. M., Attamimi, A. N. R., Putri, D. A. V. +, Nirmala, I., Fadhilah, A. N. +, & Amilah, N. (2022). *Statistik Pendidikan Tinggi Higher Education Statistics 2 0 2 2*. 7, 1–421.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225(87), 48–61.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tanadji, C. R. (2024). *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi terhadap tax morale dan kepatuhan wajib pajak*. Universitas Pelita Harapan.
- Widya, K., Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). *Prosiding SNAM PNJ*, 1–12.
- Wright, K. B. (2005). Researching Internet-Based Populations: Advantages and Disadvantages of Online Survey Research, Online Questionnaire Authoring Software Packages, and Web Survey Services. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 10(3), 0.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00259.x>

- Yusoff, Y. H., Isahak, M. S., Hashim, M. R., Khan, N. I., & Zuberi, I. (2022). The Influence of Perception and Tax Knowledge on Non-Compliance in Indirect Tax Among Public Universities Student. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(21), 145-150. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i21.3747>
- Zhang, Y. (2021). *Understanding how education affects students' attitudes towards tax evasion and tax avoidance in New Zealand*. 147.